

Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 2 No 2 (2023), Halaman: 123-130

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Analisis Bibliometrik Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017-2022

Orlando Padoma^{1,2}

Yujitia Ahdarrijal^{1,2} ✉

Aulia Nur Kasiwi^{1,2}

Yogyakarta, Indonesia⁽¹⁾

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ⁽²⁾

✉ y.ahdarrijal.psc23@mail.umy.ac.id

Kata kunci:

Tingkat Kemiskinan,
Pemerintah, Provinsi
Papua

Abstrak

Kemiskinan adalah permasalahan yang terjadi di beberapa kalangan masyarakat dalam kategori menengah kebawah. Peran pemerintah perlu dilakukan untuk menekan angka kemiskinan yang semakin melanda pada saat ini apalagi kemiskinan merupakan salah satu Indeks dalam pembangunan daerah yang baik dan dalam mencapai good governance. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permasalahannya menjadi sebuah tolak ukur dalam mengetahui sejauh mana pemerintah di provinsi papua dalam berupaya meningkatkan kapasitas hidup masyarakat papua dan menekan angka kemiskinan ini. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian Pustaka. Data yang telah dikumpulkan yakni dengan mengakses 40 artikel bersitasi dengan mengambil kurung waktu lima tahun terakhir dari 2017 sampai dengan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya tingkat kemiskinan di provinsi papua di pengaruhi oleh ketersediaan mata pencaharian yang masih kurang ditengah masyarakat yang menyebabkan banyaknya pengangguran yang nantinya akan berakibat akan tingkat kemiskinan yang menjulang tinggi di pemerintah provinsi papua. Hal yang demikian akan memperparah dan angka kemiskinan akan semakin meningkat di daerah papua.

Keywords:

Poverty Level,
Government, Papua
Province

Abstract

Poverty is a problem that occurs in several circles of society in the lower middle category. The role of the government needs to be done to suppress the poverty rate which is increasingly hitting at this time especially poverty is one of the indexes in good regional development and in achieving good governance. The ability of the community to meet the needs of their problems becomes a benchmark in knowing the extent to which the government in Papua province is trying to improve the living capacity of the Papuan people and reduce this poverty rate. This research method is using qualitative research methods through library studies. The data that has been collected is by accessing 40 citing articles by taking the last five years from 2017 to 2022. The results show that the poverty rate in Papua province is influenced by the availability of livelihoods that are still lacking in the community which causes a lot of unemployment which will later be will result in a high level of poverty in the Papua provincial government. This will worsen and the poverty rate will increase in the Papua region..



DOI: 10.57122/integral.v2i2.33

1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian dengan tema kemiskinan pada khususnya di Provinsi Papua dalam menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan good governance pada kurun waktu 2017-2022. Kemiskinan merupakan masalah utama diberbagai negara dunia, salah satunya negara Indonesia , hal ini disebabkan karena kemiskinan itu sendiri merupakan hal yang bersifat multidimensi atau bisa dikatakan bahwa kebutuhan manusia yang sangat beragam atau bermacam-macam. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemiskinan itu sendiri bisa dikatakan sebuah kondisi manusia tidak bisa untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhannya atau belum memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dalam hal Kesehatan, harga diri, rasa dihormati seperti orang lain dan standar hidup yang jelas. Oleh sebab itu berbagai macam cara yang dilakukan pemerintah maupun perindividu dalam menekan angka kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dilanda serba kekurangan terutama dalam hal-hal pemenuhan kebutuhannya seperti makanan, pakaian, air, tempat berlindung atau tempat tinggal serta dalam hal Pendidikan dan pekerjaan pun belum bisa dipenuhi untuk menunjang hidup mereka. Menurut [Diyah & Adawiyah, \(2020\)](#) setidaknya terdapat dua kondisi yang mencerminkan kemiskinan itu terjadi, yakni kemiskinan yang structural dan juga kemiskinan yang bersifat alami.

Kemiskinan yang bersifat structural bisa terjadi disebabkan di Lembaga-lembaga yang dimana di dalamnya masyarakat memiliki ketidakmampuan dalam menguasai sarana dan juga prasarana yang ada di sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa berbagai persoalan kemiskinan tidak jauh dari masalah di berbagai bidang seperti halnya bidang social, psikologi, ekonomi, dan juga politik. Aspek social biasanya terjadi diakibatkan terbatasnya interaksi social dengan seorang penguasa informannya. Kemudian di bidang Ekonomi juga demikian, kerap terjadi akibat pemilihan factor upah yang rendah atau rendahnya upah kepada produksi, daya tawar pada petani yang masih rendah serta rendahnya tingkat tabungan yang dimiliki dalam mengantisipasi berbagai peluang dan usaha yang ada. Begitu juga dalam bidang Psikologi yang jika dilihat dan diperhatikan bahwa kemiskinan dapat terjadi akibat adanya rasa males rasa telisolir, rasa rendah diri dan fatalism pada diri seseorang yang membuatnya tidak mau berusaha dan berserah pada takdir. Dan yang terakhir adalah pada bidang politik, keadaan politik sangat erat kaitannya dengan akses sebuah fasilitas dan kesempatan terbuka, begitu juga deskriminasi, posisi yang lemah dan juga posisi dalam mengambil sebuah keputusan di dalamnya. Selanjutnya adalah kemiskinan alamiah yang bisa dikatakan sebagai sebuah kemiskinan yang terjadi diakibatkan keterbatasan sumber daya dan dalam penguasaan teknologi yang ada.

Sementara itu, [Primandhana, \(2022\)](#), mengemukakan bahwa, kemiskinan adalah sesuatu tingkatan dalam kehidupan manusia yang bisa dikatakan merupakan tingkatan hidup yang minimum. Dalam kehidupannya Adapun standar dalam menjalani kehidupan yang di dasarkan pada kebutuhan pokok pangan dan juga sandang yang membuat kebutuhan atas gizi dan asupan keseharian dapat tercukupi dengan baik. Dan Provinsi papua merupakan sebuah provinsi dengan tingkatan kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan skala nasional kemiskinan di papua sepertiganya dari besaran penduduk yang ada di papua itu hidup dengan keadaan miskin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 lalu mengungkapkan sebuah fakta yang menunjukkan sebesar 944,49 ribu masyarakat di papua dibawah garis kemiskinan, atau jika di persentasikan jumlah populasi masyarakat di Provinsi papua yang mengalami kemiskinan bisa

menyentuk angka 27,38%. Jumlah yang sangat tinggi di bandingkan dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Dan jika diperhatikan lebih lanjut yang kerap mengalami kemiskinan lebih parah terjadi di pedesaan di Papua yang bisa menyentuk angka 895,25 ribu jiwa dengan persentasi 36,5% sedangkan di daerah perkotaan papua menyentuk angka 49,23 ribu jiwa atau hanya sekitar 4,94% saja. Angka yang menunjukkan disparitas antara penduduk di desa dengan di perkotaan di papua yang sama-sama mengalami kemiskinan ([BPS, 2018](#)).

Provinsi Papua adalah sebuah daerah di Kawasan Indonesia bagian timur yang bisa dikatakan sebagai daerah yang tertinggal dalam hal pembangunan ketimbang dengan daerah lainnya. Pemberian kebijakan untuk daerah ini pun untuk mengelola pembangunan daerahnya masing-masing terus dilakukan bahkan ditambah dan diupayakan sebaik-baiknya. Kebijakan dan program pemerintah sangat diharapkan dalam mengembangkan daerah ini dan memajukan di berbagai aspek terutama dalam pembangunan perekonomiannya. Masing-masing daerah kabupaten atau kota yang berada di Papua nantinya memiliki sebuah keduudkan yang sama atau sejajar dengan daerah lainnya dalam hal ekonomi dan juga pembangunan. Dilihat dari berbagai program , yang patut disoroti adalah program pembangunan Kampung dengan cara berorientasi pada pembangunan wilayah dan juga masyarakatnya yang ada di sana secara intensif dan terikat dalam tingkatan kampung. Di papua masih banyak menunjukan keterbatasan fasilitas dan infrastuktur publik, dan juga bisa dikatakan masih kategori rendahnya beberapa jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan perekonomian masyarakatnya [Yunier, \(2017\)](#).

1.2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan merupakan serangkaian kebijaksanaan yang terjadi atau upaya yang di gunakan menjadi sebuah pedoman untuk melaksanakan atau mengambil sebuah keputusan kedepannya yang bisa di anggap sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan [Nuryanti, \(2017\)](#). Kebijakan hendaknya harus bisa di implementasikan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat dan daerah. Karena Implementasi sebuah kebijakan dari pemerintah daerah tersebut sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan sebuah negara dalam berbangsa untuk meningkatkan taraf perekonomian, sumber daya yang dimiliki entah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki sebuah daerah ataupun negara tersebut entah melalui kebijakan Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik bahkan di bidang Pendidikan [Liwiya et al., \(2018\)](#).

Ketika berbicara mengenai Kebijakan publik, Kebijakan public itu sendiri merupakan sebuah keputusan yang di ambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan atau memutuskan sebuah persoalan dengan bijaksana. Jika di perhatikan dari definisinya menunjukkan bahwasannya pemerintah melalui otoritas sudah membuat sebuah kebijakan yang bersifat sangat mengikat. Karena dalam pembuatannya sangat ideal jika melibatkan masyarakat dengan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut karena sifatnya nanti bakal solit dan sangat mengikat. Sebuah kebijakan yang sudah di sepakati dan dibuat harus mampu di jalankan dan harus di ikuti oleh siapapun entah itu dari pemerintah maupun dari masyarakat yang di ikatnnya melalui kebijakan [Joko Pramono, \(2020\)](#).

Penyelesaian masalah kemiskinan diberbagai daerah sangat sulit dilakukan, hal tersebut bukan hal yang sangat mudah bagi pemeribtah dan juga masyarakat di wilayah tersebut. Bahkan Kemiskinan sendiri merupakan sebuah permasalahan yang menyeluruh di berbagai negara yang dari dulu hingga saat ini masih mendapat perhatian khusus melalui pemerintahnya. Kebangkitan ekonomi kelalui berbagai kebijakan dan juga mengusahakan investasi untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi kemjadi harapan yang terjadi di berbagai belahan negara

manapun yang masih saat ini menjadi sebuah perdebatan antara negara-negara dalam memajukan dan menekan angka kemiskinan di negara atau daerahnya [Christiaensen & Martin, \(2018\)](#). Demikian menurut data dari [\(BPS,2018\)](#) bahwasanya Sebagai sebuah negara dengan range terbesar keempat dengan kategori penduduk di dunia, permasalahan kemiskinan ini menjadi sebuah permasalahan dari masa ke masa, seperti menjadi sebuah perhatian yang harus terus di tekan angka lajunya di berbagai daerah terkhusus di Provinsi Papua ini. Pembangunan ekonomi di barengi dengan leju pertumbuhan menjadi sebuah tantangan yang besar bagi sebuah negara dalam menekan angka kemiskinan ini. Sebesar 25,95 juta penduduk di di Indonesia bisa dikategorikan sebagai penduduk miskin [\(BPS, 2018\)](#). Angka yang demikian besar ini bisa di setarakan dengan jumlah populasi manusia di benua Australia dan juga 5 kali jumlah populasi penduduk di negara Singapura, angka tersebut sangat besar [\(World Bank, 2018\)](#).

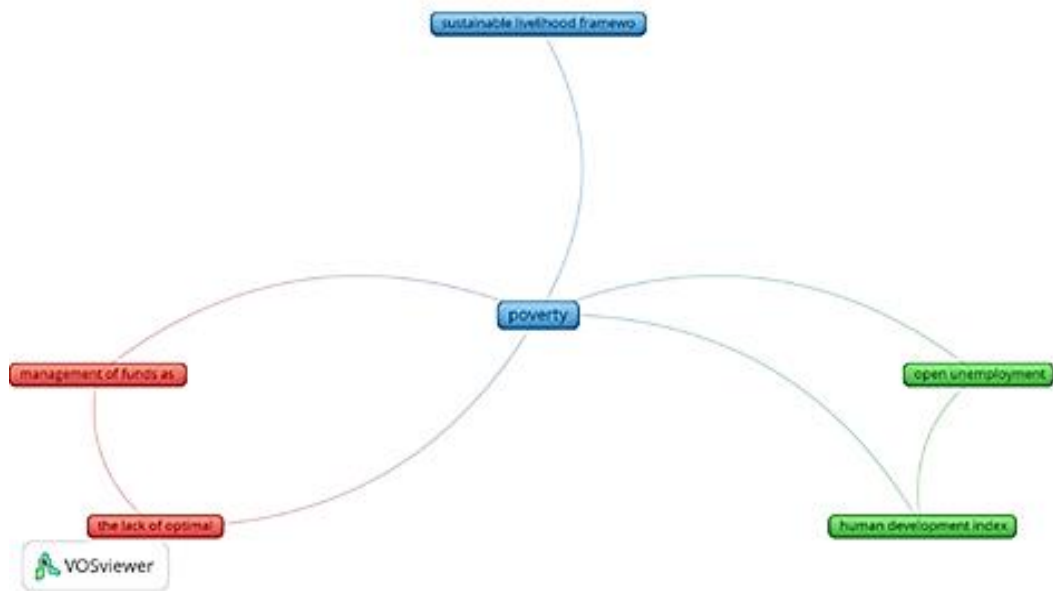
Kemiskinan bisa diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi standar hidupnya dengan kategori minimum yakni seperti kebutuhan sandang dan pangan [Syairozi, \(2020\)](#). Kemiskinan ini masuk dalam kategori ketimpangan social yang di sebabkan oleh ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka [Ratih, \(2022\)](#). Namun, masih jauh sangat rendah dari masyarakat yang ada di sekitar mereka [Widodo et al. \(2022\)](#). Angka ketimpangan yang cukup besar dilihat dari pendapatan yang diterima dari olongan kaya dan juga golongan bawah yang sangat jauh berbeda, maka dari itu besarnya angka pertumbuhan penduduk dengan kategori miskin dibandingkan dengan permasalahan distribusi pendapatannya [Adams dan Dwi, \(2022\)](#).

2. METODE

Metode penelitian menggunakan kualitatif melalui kajian Pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang objek penelitiannya berasal dari jurnal berdasarkan artikel yang ada di database SCOPUS. Sumber data yang diperoleh adalah kumpulan artikel ilmiah berstandar internasional. Berdasarkan artikel yang ada di database SCOPUS. Artikel akan direview berdasarkan beberapa tahapan, antara lain pencaharian artikel dan pemetaan topik untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sumber pokok masalah. menggunakan Vosviewer dan pengelolaan data lainnya. Data yang dikumpulkan dengan mengakses jurnal di SCOPUS dan memperoleh 40 artikel bersitasi dengan rentang waktu lima tahun dari 2017 sampai dengan 2022 dengan menggunakan kata kunci "poverty in papua" "poverty indicators" "papua province".

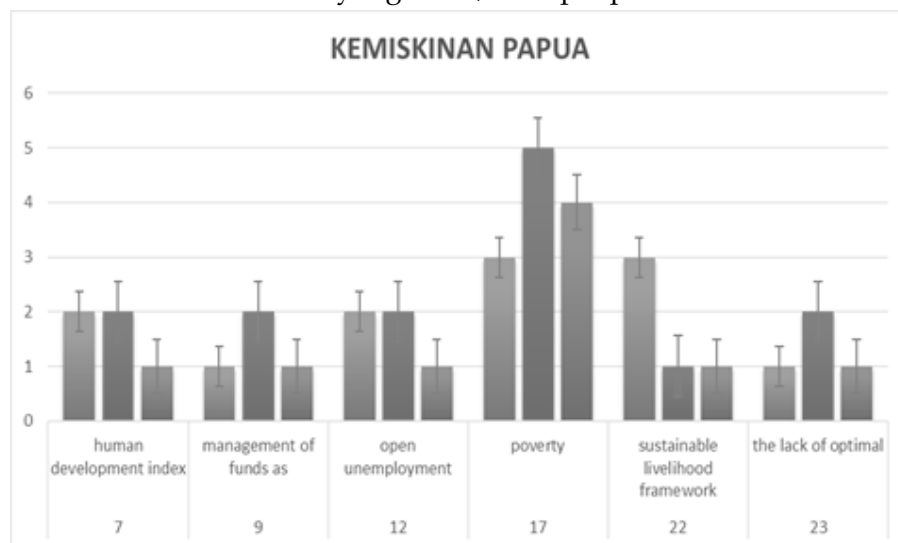
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukan data berdasarkan hasil analisis bibliometrik yang dengan representasi dalam bentuk nodes dan edge [\(Prastya et al., 2022\)](#). Data tersebut divisualisasikan dalam bentuk jejaring data, overlay, dan kepadatan data [\(Hufiah et al., 2022\)](#) yang dihasilkan dari antar topik pada 40 dokumen yang sebelumnya diperoleh melalui search engine Scopus. Setidaknya ditemukan 6 item yang terbagi menjadi 3 Cluster yang dimana cluster tersebut dapat dibedakan melalui warna merah (cluster 1), hijau (cluster 2) dan biru (cluster 3).



Gambar 1. Analisis Bibliografi Pada Tingkat Kemiskinan di Pemerintah Provinsi Papua

Data yang diolah melalui aplikasi VosViewer dengan tema Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Pemerintah Provinsi Papua terbagi menjadi 3 Cluste utama. Cluster pertama dengan isu utama berkaitan dengan kata kunci The Lack Of Optimal and Management Of Fund As dengan bobot persentase sebesar 33.3%. Cluster kedua memiliki bobot persentase sebesar 33.3% dengan kata kunci berupa Open Unemployment and Human Development Index. Dan pada Cluster ketiga yang berkaitan dengan isu utama dengan kata kunci Sustainable Livelihood Framework and Poverty yang memiliki bobot sebesar 33.3%. Kata kunci cluster diambil berdasarkan ukuran nodes yang besar, terdapat pada visualisasi VosViewer.



Gambar 2. Indikator Penyebab Tingkat Kemiskinan di Pemerintah Provinsi Papua

Pada cluster 1, nodes dengan kata kunci "The Lack Of Optimal." menjadi nodes dengan ukuran terbesar. Cluster 2, nodes dengan kata kunci "Open Unployment" Sebagai nodes dengan ukuran terbesar. Sedangkan Cluster 3, nodes dengan kata kunci "Sustainable Livelihood Framework" dengan nodes ukuran terbesar. Edge (jarak antar nodes) dikatakan 'memiliki

hubungan kuat' antar nodes apabila jarak antar nodes saling berdekatan Dikutip dari [Aribowo, \(2019\)](#) dalam [Hufiah et al., \(2022\)](#); [Prastya et al., \(2022\)](#). Sebagai kata kunci terbesar pada cluster 3, kata "Sustainable Livelihood Framework." menjadi fokus utama, dimana edge menunjukkan bahwa kata kunci utama memiliki hubungan dekat dengan kata kunci "The Lack Of Optimal" dan "Open Unemployment". Hal yang demikian terlihat bahwa , tingkat kemiskinan di Provinsi Papua di pengaruhi oleh Kurang optimalnya berbagai sector di Provinsi Papua tersebut, seperti lapangan pekerjaan, mutu Pendidikan yang baik, kurang optimalnya penggunaan dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah kepada daerah tersebut yang nantinya membuat daerah tersebut terus tidak bisa berkembang dan meningkatkan kualitas Sumber Daya yang dimiliki, selain itu yang menyebabkan Kemiskinan yang semakin merajalela di Papua adalah Pengangguran terbuka. pengangguran terbuka yang banyak disana diakibatkan kualitas Sumber Daya yang dimiliki yang tidak dibelaki dengan Pendidikan serta akses yang memadai sehingga hal tersebut dapat meningkatkan dan tidak bisa menekan angka kemiskinan di Papua itu sendiri.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Sustainable Livelihood Framework merupakan factor terbesar yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan di Papua yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat dan besaran kemiskinan yang ada di daerah Papua hal tersebut harus mampu di minimalisir dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang mempuni untuk dapat mendapatkan mata pencaharian secara berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah yang good governance.

Cluster	Cluster	Total Item Per Cluster	Persentase
Cluster 1 (Merah)	- The Lack Of Optimal - Managemen Of Funds As	2 Item	33.3%
Cluster 2 (Hijau)	- Open Unemployment - Human Deploymen Index	2 Item	33.3%
Cluster 3 (Biru)	- Sustainable Livelihood Index - Poverty	2 Item	33.3%
TOTAL			

Gambar 3. Cluster VosViewer Tingkat Kemiskinan di Pemerintah Provinsi Papua

Jika dilihat dan diperhatikan kita mengetahui bahwasannya dalam Cluster 1 yang berisikan "The Lack Of Optimal" dan " Management Of Funds As" , Cluster 2 yang berisikan "Open Unemployment" dan "Human Deploymen Index" serta Cluster 3 yang memiliki item "Sustainable Livelihood Index" dan "Poverty", sangat memiliki keterkaitan dalam menentukan angka dan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

4. KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan sebuah idnikator keberhasilan dan juga memperlihatkan bahwa negara yang baik dalam segi pemerataan ekonomi tercapain oleh karena itu harus mampu di tekan dan diminimalisirkan agar nantinya di tahun sebelumnya angka kemiskinan yang ada di Provinsi

Papua dapat ditekan. Selain itu, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis bibliometrik pada tingkat kemiskinan Papua menghasilkan 3 cluster, 6 item, ketiga cluster tersebut sama-sama memiliki 2 item dengan presentase 33.3%. Ditemukan bahwa ada korelasi yang kuat antara cluster 1 The lack of optimal, dan Management of Found As, cluster 2 open unemployment, dan indeks development indeks, serta cluster 3 sustainable livelihood indeks, dan poverty. Ketiganya memiliki keterkaitan yang kuat dalam menentukan angka dan tingkat kemiskinan di Papua.

Tingkat kemiskinan di Papua disebabkan oleh faktor terbesar Sustainable livelihood framework, faktor ini sangat berpengaruh dalam menentukan besaran dan tingkat kemiskinan Papua. Faktor selanjutnya dikarenakan beberapa sektor belum optimal, serta pengangguran yang masih harus diatasi dan mendapat perhatian terutama pemerintah. Penghidupan yang merata di setiap daerah harus mampu dijunjung dan juga harus mampu diwujudkan dikarenakan untuk mencapai good governance harus perlu mempunyai pemerintah memberikan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya termasuk di dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup terkhusus di Pemerintah Provinsi Papua.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Diyah, S. ', & Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 2721–6918.
- Endartyana, R. Y., & Permatasari, E. O. (2020). Grouping District / Cities in Papua Based Poverty Indicators. *Journal of Physics: Conference Series*, 1490(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1490/1/012007>
- Harianja, Y., Sahara, & Muhammad Findi. (2020). Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189–200. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.189-200>
- Hasibuan, L. S., Hariani, P., & Shandra, A. (2022). Poverty Development Post Fiscal Decentralization Policy In Otsus Fund Receiving Province In Indonesia (Case Study : Province Of Papua , West Papua , And Aceh). 2(2), 562–574.
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2022). Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168–178. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496>
- Liwiya, Y., Pangkey, M. S., & Tampi, G. B. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mariati, N. P. A. M., Budiantara, I. N., & Ratnasari, V. (2019). Modeling Poverty Percentages in the Papua Islands using Fourier Series in Nonparametric Regression Multivariable. *Journal of Physics: Conference Series*, 1397(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1397/1/012071>
- Nuryanti, M. (2017). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Primandhana, L. P. & W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–16.
- Tionardi, E. F. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA. *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua) Deteriminants Of Poverty (Case Study 29 Cities / District In Papua Province). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12.
- Harianja, Y., Sahara, & Muhammad Findi. (2020). Tingkat Kemiskinan Di Pulau Papua Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189–200. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.189-200>
- Hartono, H. V. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua. *Meka*, 2(1), 58–62. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka>
- RAHMAN, A. (2020). Analisis Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2018. 257–268. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185230>
- Wambrauw, L. T., Gusti, R. M. H., & Sumule, A. I. (2018). Karakteristik Penduduk Miskin di Papua Barat. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 1(1), 69–76. <https://doi.org/10.36883/jfres.v1i1.9>
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>